

ANALISIS PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL EKONOMI PASCA BENCANA DI DESA PASIR KABUPATEN MEMPAWAH

Oleh:
Riska Widya Lismana
NIM. E42011012

Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, 2015

E-mail : Riska_lismana@yahoo.co.id

Abstrak

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan program pemberdayaan sosial ekonomi pasca bencana di Desa Pasir Kabupaten Mempawah tidak terlaksana. Penulisan skripsi ini didasarkan karena adanya masalah dalam pelaksanaan program pemberdayaan sosial ekonomi pasca bencana di Desa Pasir, antara lain adalah sosialisasi kurang intens, masyarakat meminta pelaksanaan program ini dalam bentuk uang tunai, pemerintah melaksanakan program ini pada satu kelompok tani, pemindahan program tersebut di Desa Peniti Besar. Hasil penelitian ini adalah pertama, faktor determinan utama yang menyebabkan program pemberdayaan sosial ekonomi pasca bencana di Desa Pasir tidak terlaksana yaitu faktor koordinasi dan faktor sosialisasi. Kedua, Isi dari program tersebut dimaksudkan untuk membantu masyarakat Desa Pasir yang menjadi korban bencana banjir, dengan tujuan untuk memulihkan ekonomi masyarakat yang menjadi korban banjir di wilayahnya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa faktor-faktor yang menyebabkan tidak terlaksananya program tersebut adalah kurangnya koordinasi dan sosialisasi dalam pelaksanaan program tersebut. Saran terhadap pelaksanaan program pemberdayaan sosial ekonomi pasca bencana adalah untuk memulihkan ekonomi masyarakat yang menjadi korban banjir maka program tersebut harus dilaksanakan secara merata, tepat sasaran, sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, diperlukan koordinasi, dan sosialisasi yang berkali-kali.

Kata-kata Kunci : Program pemberdayaan, Faktor determinan, Isi kebijakan.

Socio-Economic Empowerment Program Analysis Post-disaster in the Village of Pasir Mempawah Regency

ABSTRACT

This research aims to determine the factors that cause socio-economic empowerment program after the disaster in the Village of Pasir Mempawah Regency not materialize. This research is based due to problems in the implementation of the socio-economic empowerment program after the disaster in the village of Pasir, such as socialization less intense, the community asked for the implementation of this program in the form of cash, government implement this program on a group of farmers, the transfer of the program in the Village of Peniti Besar. Results of this research are the first, the main determinant factors that cause socio-economic empowerment program after the disaster in the village of Pasir not done that coordination factor and socialization factor. Second, The contents of the program intended to help pasir village communities who are victims of the floods, with the aim of restoring the local economy are becoming victims of flooding in its territory. The conclusion from this research are that factors that lead to not implementation of the program are the lack of coordination and socialization in the implementation of the program. Advice on the conduct of socio-economic empowerment program after the disaster are to restore economy people who become flood victims then the program should be implemented uniformly, right on target, according to predefined rules, the necessary coordination, and socialization to many times.

Keywords: empowerment program, the determinant factor, policy content.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara yang sering terjadi bencana alam. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bencana mempunyai arti sesuatu yang menyebabkan atau menimbulkan kesusahan, kerugian atau penderitaan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007, bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Banjir merupakan salah satu bencana alam yang sering terjadi di Indonesia. Banjir dapat disebabkan oleh penebangan hutan liar (*illegal logging*), tidak adanya tanah resapan, dan sampah yang menumpuk di saluran air. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terdapat 11 provinsi di Indonesia yang memiliki potensi tinggi banjir, yaitu Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur. Hal ini menyebabkan pemerintah Indonesia mempunyai tanggungjawab dalam menanggulangi bencana alam khususnya banjir.

Indonesia di tingkat pusat maupun daerah, sering terjadi kegagalan pelaksanaan kebijakan maupun program. Salah satu contoh kebijakan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana banjir.

Adanya bencana banjir di Desa Pasir Kabupaten Mempawah pada tahun 2010 memberikan dampak yang sangat merugikan, hal ini dipaparkan oleh bapak AI Bendahara Rutin Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mempawah :

“ Adenye banjer ini banyak kerugian yang dapat dirasakan terutama masyarakat desa pasernye sendiri, tanaman padi mereka banyak yang mati, banyak tanaman sahang mati, jalan-jalan banyak yang rusak.” (28 Agustus 2014).

Adanya bencana banjir yang memberikan dampak yang merugikan, maka diberikan dana bantuan sosial berpola hibah yang berdasarkan Nota Kesepahaman (MoU) Nomor. 17/BNPB/XI/2010 dan Nomor. 360/2256/BLHPB-D tentang dana bantuan sosial berpola hibah kegiatan pemberdayaan sosial ekonomi pasca bencana tahun 2010. Tujuan dari program pemberdayaan sosial ekonomi pasca bencana ini adalah untuk memulihkan ekonomi masyarakat yang menjadi korban

banjir di wilayahnya. Pelaksanaan program ini berupa : pertama, pengadaan sarana budidaya buah, kedua, pengadaan ternak sapi. Akan tetapi program ini tidak terlaksana seperti yang diharapkan, Kepala Desa Pasir, bapak Nasir dalam Rachmat (2011), pada saat aksi damai yang dilakukan masyarakat Desa Pasir mengatakan :

“Masyarakat tetap mendesak agar program tersebut dilaksanakan di Desa mereka. Namun, diminta agar dalam bentuk banyak kelompok, bukan hanya satu kelompok. Jika memungkinkan dalam bentuk tunai, harapan mereka seperti itu”.

Selain itu, berdasarkan hasil pra survey yang dilakukan kepada bendahara rutin Penanggulangan Bencana Daerah yakni bapak AI, 28 Agustus 2014 memberikan pernyataan :

“Masyarakat desa pasir itu pernah melakukan demo di kantor Bupati Mempawah, mereka minta dibagikan duit, dalam bentuk tunai, sebesar tiga juta lima ratus rupiah. Program itu kan berbentuk hibah, mereka mengira hibah seperti diberikan uang, sedangkan maksudnya bukan seperti itu, jika dibagikan berupa uang tunai tidak akan ada dampaknya, mereka akan konsumtif dan tidak berkelanjutan. Program buah naga itu bisa sampai dengan 25 tahun, makanya program ini tidak berjalan. Di Segedong

program ini berhasil, ada kelompok plasma dan kelompok inti. Kelompok inti terdapat 33 orang dan kelompok plasma terdapat 200 KK”.

Tidak terlaksananya program pemberdayaan sosial ekonomi pasca bencana di Desa Pasir Kabupaten Mempawah menyebabkan program tersebut dipindahkan di Desa Peniti Besar Kecamatan Segedong, Program pemberdayaan sosial ekonomi pascabencana di Desa Peniti Besar berhasil dilaksanakan dan dikembangkan. Menurut kepala Badan Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Daerah yakni bapak Syahrizal dalam fisa (tt) mengatakan:

“Perkebunan buah naga dari program sosial ekonomi pasca bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2010-2011, ini sudah menghasilkan 95,1 ton buah naga dengan omzet penjual mencapai Rp 1.575.075.600. Komoditi buah naga kita ini sudah diakui pemerintah pusat. Alhamdulillah, kita mendapat kepercayaan untuk memamerkan buah naga pada pameran Bulan Pengurangan Resiko Bencana BNPB pada 13 – 15 Oktober 2014 di Bengkulu”.

Selanjutnya, Bupati Kabupaten Mempawah menyebutkan, dalam Fisa (2014) :

“Keberhasilan pengelolaan kebun buah naga tersebut tak lepas dari dukungan

masyarakat setempat. Sekarang sudah berhasil dan dapat dinikmati oleh masyarakat manfaatnya. Kami senang dengan pencapaian ini. Dorongan, dukungan, dan pembinaan yang dilakukan PemKab bersama sejumlah pihak terkait membuahkan hasil yang maksimal”.

Selain itu, dalam madrosid (2014) dinyatakan bahwa program penanaman buah naga pasca bencana banjir dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Kabupaten Mempawah, dinilai paling sukses di antara program lainnya. Adanya perbedaan antara pelaksanaan program di Desa Peniti Besar Kecamatan Segedong yang berhasil dilaksanakan dengan pelaksanaan program di Desa Pasir Kecamatan Mempawah Hilir yang tidak terlaksana, sehingga peneliti ingin mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan program pemberdayaan sosial ekonomi pasca bencana di Desa Pasir Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah tidak terlaksana, dengan judul penelitian “Analisis Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi Pasca Bencana di Desa Pasir Kabupaten Mempawah”.

2. RumusanPermasalahan

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka rumusan permasalahan, yaitu :

Mengapa program pemberdayaan sosial ekonomi pasca bencana di Desa Pasir Kabupaten Mempawah tidak terlaksana?

3. TujuanPenelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah : Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan program pemberdayaan sosial ekonomi pasca bencana di Desa Pasir Kabupaten Mempawah tidak terlaksana.

4. ManfaatPenelitian.

1) Manfaat Teoritis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengembangan ilmu pemerintahan dibidang analisis kebijakan publik.

2) Manfaat Praktis

a. Memberikan masukan bagi pelaksana program khususnya Badan Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Daerah untuk dijadikan bahan pertimbangan dan bahan referensi dalam melaksanakan program.

b. Memberikan masukan kepada kelompok tani di Desa Pasir sebagai pelaksana lapangan untuk dijadikan pembelajaran dan pertimbangan dalam melaksanakan program.

B. TEORI DAN METODOLOGI

1. Teori

a) Kebijakan Publik

Kebijakan dalam Wahab (2012:9) ialah pedoman untuk bertindak. Thomas R. Dye dalam Nugroho (2003:3) mendefinisikan kebijakan publik sebagai segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda. Carl Friedrich dalam Agustino (2012:7), mengatakan bahwa kebijakan adalah :

“serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud”

Kemudian, Harold Laswell dalam Nugroho (2003:3) mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu nilai-nilai tertentu, dan praktek-praktek tertentu. Berdasarkan pernyataan tersebut maka dalam penulisan ini, peneliti lebih menekankan pada program pemerintah yaitu program pemberdayaan

sosial ekonomi pasca bencana di Desa Pasir Kabupaten Mempawah.

b) Analisis Kebijakan Publik

Kebijakan publik agar mampu mencapai apa yang menjadi tujuannya maka perlu dilakukan analisis. Analisis kebijakan dalam Dunn (2012:1) adalah aktivitas menciptakan pengetahuan tentang dan dalam proses pembuatan kebijakan.

Carl W. Patton dan David S. Savicky dalam Nugroho (2003:84), dengan gamblang menjelaskan bahwa analisa kebijakan adalah tindakan yang perlu dilakukan untuk dibuatnya sebuah kebijakan, baik kebijakan yang baru sama sekali, atau kebijakan yang baru sebagai konsekuensi dari kebijakan yang ada.

Menurut Leslie A. Pal dalam Widodo (2006:27) paling tidak terdapat tiga macam gaya analisis kebijakan, yakni :

1. Deskriptif mencakup analisis isi (content analysis) dan analisis sejarah (historical analysis).
2. Proses.
3. Evaluasi yang mencakup evaluasi secara logika, empiris, dan etika.

Leslie A. Pal dalam Widodo (2006:23), mengemukakan bahwa terdapat tiga elemen atau komponen dalam proses kebijakan yang bisa jadi sesuai dengan target dari analisis:

1. Terdapat faktor determinan utama dalam setiap kebijakan yang menghasilkan kebijakan.

Faktor determinan tersebut bisa jadi berasal dari kekuatan lingkungan luar, seperti tingkat pertumbuhan ekonomi, budaya politik yang mendorong opini publik, terjadinya konflik antarpantai, antarkelompok kepentingan dan kelompok penekan, dan ekspose antar media masa.

2. Terdapat isi (content) kebijakan yang bisa jadi termasuk maksud dan tujuan kebijakan, pendefinisian masalah, dan instrumen kebijakan pemerintah.

3. Terdapat dampak kebijakan.

Dampak kebijakan tersebut dibedakan dalam dua macam, yakni dampak yang diharapkan dan dampak yang tidak diharapkan (*intended and unintended impacts*) bagi kelompok sasaran kebijakan. Seperti dalam sistem politik berupa legitimasi dalam sistem ekonomi berupa produktivitas dan persaingan, sedangkan dalam sistem sosial berupa kohesi masyarakat.

Berdasarkan teori yang telah dikemukakan oleh Leslie A. Pal dalam Widodo (2006:23), maka peneliti bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan tidak terlaksananya program pemberdayaan sosial ekonomi pasca

bencana di Desa Pasir Kabupaten Mempawah.

c) Konsep Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi Pasca Bencana

Menurut undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Dalam mengatasi masalah bencana alam tersebut, maka diperlukan keterlibatan pemerintah dalam mengatasi masalah bencana alam tersebut. Keterlibatan pemerintah dapat berupa suatu kebijakan yang melahirkan suatu program penanggulangan bencana.

Salah satu contoh program pemerintah dalam penanggulangan bencana, yaitu program pemberdayaan sosial ekonomi pasca bencana. Berdasarkan Nota Kesepahaman (MoU) Nomor. 17/BNPB/XI/2010 dan Nomor. 360/2256/BLHPB-D tentang dana bantuan sosial berpola hibah kegiatan pemberdayaan sosial ekonomi pasca bencana tahun 2010, maka diberikan dana rehabilitasi dan

rekonstruksi pasca bencana kepada masyarakat di Desa Pasir Kabupaten Mempawah. Menurut undang-undang nomor 24 tahun 2007, definisi rehabilitasi dan rekonstruksi yaitu :

1. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
2. Rekontruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintah maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.

Pelaksanaan program ini berupa : pertama, pengadan sarana budidaya buah naga,dan kedua, pengadaan ternak sapi.Melalui program ini diharapkan dapat memulihkan ekonomi masyarakat korban bencana alam.

Dalam menjalankan suatu program sering terjadi kegagalan. Oleh karena itu, Menurut Siagian suatu program harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut (Tachjan, 2006:32) :

2. Metode Penelitian

Penelitian dengan judul Analisis Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi Pasca Bencana di Desa Pasir Kabupaten Mempawah dilaksanakan dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan analisa data secara kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan serta fenomena secara mendalam mengenai program pemberdayaan sosial ekonomi pasca bencana di Desa Pasir Kabupaten Mempawah.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini peneliti lebih memfokuskan penelitian pada faktor determinan utama dalam program pemberdayaan sosial ekonomi pasca bencana di Desa Pasir Kabupaten Mempawah dan isi (*content*) program pemberdayaan sosial ekonomi pasca bencana di Desa Pasir Kabupaten Mempawah.

1. Faktor Determinan Utama dalam Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi Pasca Bencana di Desa Pasir Kabupaten Mempawah.

Berdasarkan hasil penelitian dalam menjalankan program pemberdayaan social ekonomi pasca bencana di Desa Pasir terdapat berbagai masalah yang menyebabkan program tersebut tidak terlaksana. Adanya masalah dalam pelaksanaan program pemberdayaan sosial ekonomi pasca bencana yang menyebabkan program ini tidak terlaksana dikarenakan terdapatnya faktor determinan utama dalam program pemberdayaan sosial ekonomi pasca bencana. Pertama faktor koordinasi, koordinasi sangat diperlukan dalam perumusan program pemberdayaan sosial ekonomi pasca bencana. Dalam perumusan program tersebut menggunakan pendekatan *top-down* yaitu perumusan program dilakukan tersentralisir dan dimulai dari tingkat pusat, dan keputusan diambil dari tingkat pusat. Hal ini menyebabkan program tersebut tidak tepat sasaran yang seharusnya diberikan kepada seluruh masyarakat Desa Pasir yang menjadi korban bencana banjir akan tetapi hanya diberikan kepada satu kelompok tani saja. Kedua faktor sosialisasi, kurangnya sosialisasi yang dilakukan pihak pelaksana kepada masyarakat menyebabkan

masyarakat tidak mengetahui dan mengerti maksud dan tujuan dari program tersebut.

2. Isi (content) Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi Pasca Bencana di Desa Pasir Kabupaten Mempawah

Program pemberdayaan sosial ekonomi pasca bencana di Desa Pasir Kabupaten Mempawah dimaksudkan untuk membantu korban bencana alam, yaitu korban bencana banjir yang ada di Desa Pasir dengan tujuan untuk memulihkan ekonomi masyarakat yang menjadi korban banjir di wilayahnya. Berdasarkan Nota Kesepahaman (MoU) Nomor. 17/BNPB/XI/2010 dan Nomor. 360/2256/BLHPB-D sumber dana yang dipergunakan dalam pelaksanaan program pemberdayaan sosial ekonomi pasca bencana di Desa Pasir yaitu dana rehabilitasi dan dana rekonstruksi pasca bencana bersumber dari DIPA BNPB Tahun Anggaran 2010 Revisi ke-IV Nomor : 0136/999-08.1/-/2010 tanggal 24 November 2010. Jumlah dana yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Mempawah sebesar Rp. 15.000.000.000. Akan tetapi dalam pelaksanaannya program ini terdapat beberapa masalah, diantaranya : adanya ketidakadilan dari pemerintah yang hanya melaksanakan program ini pada satu kelompok, adanya permintaan dari

masyarakat agar pelaksanaan program ini dalam bentuk uang tunai yang dibagikan kepada setiap kepala keluarga, lahan yang akan digunakan dalam melaksanakan program tersebut termasuk dalam kawasan hutan produksi, kesalahpahaman masyarakat dalam pelaksanaan program tersebut yang berpola hibah, serta pemindahan program tersebut ke Desa Peniti Besar Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah.

D. SIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN

1. Simpulan

Berdasarkan uraian-uraian dan analisis yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka peneliti mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Faktor determinan utama yang menyebabkan program pemberdayaan sosial ekonomi pasca bencana di Desa Pasir Kabupaten Mempawah tidak terlaksana yaitu faktor koordinasi dan factor sosialisasi.
- b. Berkenaan dengan isi (*content*) program pemberdayaan sosial ekonomi pasca bencana di Desa Pasir Kabupaten Mempawah, program tersebut dimaksudkan untuk membantu masyarakat yang menjadi korban banjir

di Desa Pasir Kabupaten Mempawah dengan tujuan untuk memulihkan ekonomi masyarakat yang menjadi yang menjadi korban banjir diwilayahnya. program tersebut berupa : pertama, pengadan sarana budidaya buah naga, dan kedua, pengadaan ternak sapi.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti mengajukan beberapa saran terhadap pelaksanaan program pemberdayaan sosial ekonomi pasca bencana di Desa Pasir Kabupaten Mempawah :

1. Faktor determinan utama yang menyebabkan program pemberdayaan sosial ekonomi pasca bencana di Desa Pasir tidak terlaksana yaitu faktor koordinasi dan faktor sosialisasi. Agar program pemberdayaan sosial ekonomi pasca bencana di Desa Pasir terlaksana maka dibutuhkan koordinasi antara pihak pemerintah dan masyarakat dalam perumusan program tersebut agar program tersebut tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, dalam pelaksanaan program tersebut diperlukan sosialisasi yang intens agar maksud dan tujuan program tersebut dapat dipahami dan dimengerti oleh masyarakat.

2. Isi (*content*) program pemberdayaan sosial ekonomi pasca bencana. Berdasarkan maksud dan tujuan kebijakan sudah terdapat dengan jelas. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya terdapat masalah dan hambatan. Untuk mengatasi masalah yang terdapat dalam pelaksanaan program pemberdayaan sosial ekonomi pasca bencana di Desa Pasir, maka diperlukan koordinasi antara pihak pemerintah dan masyarakat, serta sosialisasi yang berkali-kali. Sehingga program tersebut tepat sasaran, sesuai dengan tujuannya, dan masyarakat menjadi tahu dan mengerti maksud dan tujuan dari program tersebut.

3. Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu penelitiannya menentukan focus penelitian pada faktor determinan utama yang menyebabkan program pemberdayaan sosial ekonomi pasca bencana di Desa Pasir tidak terlaksana dan isi program pemberdayaan sosial ekonomi pasca bencana. Sehingga banyak pembahasan yang tidak diteliti oleh peneliti seperti faktor yang menyebabkan program tersebut dibuat, proses pembuatannya, dampak yang dirasakan karena tidak terlaksananya program tersebut serta keberlanjutan dari program tersebut

untuk membantu masyarakat yang menjadi korban bencana banjir.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

Agustino, Leo. 2012. **Dasar-Dasar Kebijakan Publik**. Bandung : Alfabeta.

Bungin, Burhan. 2006. **Metodologi Penelitian Kuantitatif**. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

-----, 2010. **Penelitian Kualitatif**. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.

Dunn, William N. 2012. **Analisis Kebijakan Publik**. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Nugroho, Riant. 2003. **Kebijakan Publik**. Jakarta : Elex Media Komputindo.

Purwanto, Erwan Agus, Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. **Implementasi Kebijakan Publik**. Yogyakarta : Gavamedia.

Santosa, Pandji. 2008. **Administrasi Publik**. Bandung : Aditama.

Satori, Djam'an, Aan Komariah. 2011. **Metodologi Penelitian Kualitatif**. Bandung : Alfabeta.

Subarsono, AG. 2005. **Analisis Kebijakan Publik**. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2013. **Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D**. Bandung : Alfabeta.

-----, 2014. **Memahami Penelitian Kualitatif**. Bandung : Alfabeta.

Suharto, Edi. 2011. **Kebijakan Sosial**. Bandung : Alfabeta.

Tachjan, H. 2006. **Implementasi Kebijakan Publik**. Bandung : Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPPI).

Wahab, Solichin Abdul. 2012. **Analisis Kebijakan**. Jakarta : Bumi Aksara.

Widodo, Joko. 2006. **Analisis Kebijakan Publik**. Malang : Bayumedia Publishing.

..... 2014. **Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Universitas Tanjungpura . Pontianak**: program Studi Ilmu Pemerintahan kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Universitas Tanjungpura Pontianak.

Skripsi:

Junita, Dignasia. 2012. **Analisis Kualitas Sumberdaya Manusia dalam Mewujudkan Good Governance di Kantor Camat Singkawang Barat**. Skripsi : Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Universitas TanjungPura Pontianak.

Suwarso, Widha Anistya. 2012. **Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang**. Skripsi : Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Universitas TanjungPura Pontianak.

Peraturan Perundang-undangan:

Laporan akhir kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tahun 2010 (pemberdayaan sosial ekonomi) Kabupaten Pontianak.

Nota Kesepahaman (MoU) Nomor. 17/BNPB/XI/2010 dan Nomor. 360/2256/BLHPB-D tentang dana bantuan sosial berpola hibah kegiatan pemberdayaan sosial ekonomi pasca bencana tahun 2010.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana banjir.

Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah.

Rujukan Elektronik.

Fisa. 2014. **Panen Buah Naga 1,6 Miliar**. Melalui <http://rkonline.id/mempawah/panen-buah-naga-raup-rp-16-m> (22/3/15)

-----, (tt). **Poktan Mekar Berhasil Kembangkan Buah Naga**. Melalui <http://beritamempawah.blogspot.com/2014/10/poktan-mekar-berhasil-kembangkan-buah.html> (22/3/15).

Madrosid. 2014. **Tanaman Buah Naga Jadi Program Sukses BNPB**. Melalui <http://pontianak.tribunnews.com/2014/10/08/tanaman-buah-naga-jadi-program-sukses-bnpb> (22/3/15)

Rahmat, 2011. **Pam Unjuk Rasa PascaBencana di Kantor Bupati Pontianak**. Melalui <http://bagopsresptk.blogspot.com/2011/03/pam-unjuk-rasa-pasca-bencana-di-kantor.html>

Tahir, Arifin. (tt). **Sikap Aparatur Pemerintah Terhadap Implementasi Kebijakan Transparansi di Kota Gorontalo**. Melalui <file:///C:/Users/User/Downloads/sikap-aparatur-pemerintah-terhadap-implementasi-kebijakan-transparansi-di-kota-gorontalo.pdf> (6/9/14).

Wardah, Fathiyah. 2011. **11 Provinsi di Indonesia Berpotensi Tinggi Kena Banjir.**

Melalui

<<http://www.voaindonesia.com/content/article-11-provinsi-di-indonesia-berpotensi-tinggi-terkena-banjir-133961528/100828.html>> (6/9/14).





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA

Jalan A Yani Pontianak, Kotak Pos 78124
Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>
Email : jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika universitas tanjungpura, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Riska Widya Lismana

NIM / Periode Lulus : E42011012 / 2015

Fakultas / Jurusan : ISIP / ILMU PEMERINTAHAN

Email address / HP : Riska_lismana@yahoo.co.id / 089693401358

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**ANALISIS PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL EKONOMI PASCA BENCANA
DI DESA PASIR KABUPATEN MEMPWAH**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

fulltext ☒

☒ content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

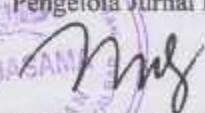
Untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

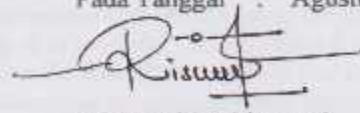
Mengetahui/disetujui

Pengelola Jurnal IP


Dr. H. Wijaya Kusuma, MA
NIP. 19620214 198603 1 001

Dibuat di : Pontianak

Pada Tanggal : Agustus 2015


(Riska Widya Lismana)